

Nomor : B/1203/KT.03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Undangan FGD Pelaksanaan Sosialisasi
Evaluasi SPBE Tahun 2024**

11 Juli 2024

Yth.

Daftar Terlampir

di

Tempat

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) tahun 2024, bersama ini kami bermaksud mengundang Saudara dalam kegiatan FGD Pelaksanaan Sosialisasi Evaluasi SPBE Tahun 2024. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Selasa – Kamis, 16 – 18 Juli 2024

waktu : 08:30 WIB s.d. selesai

tempat : *Zoom Video Conference*

acara : FGD Pelaksanaan Sosialisasi Evaluasi SPBE Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara agar dapat menugaskan perwakilan IPPD yang kompeten untuk menghadiri kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan link zoom, perwakilan IPPD dapat mendaftarkan, paling banyak 2 akun zoom, melalui tautan <https://s.id/SosialisasiEvaluasi2024>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

DAFTAR PENERIMA SURAT

Kementerian

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
27. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
28. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
4. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

5. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial;
6. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI;
9. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
10. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional RI;
13. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
14. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
15. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut;
17. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan;
18. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
20. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
21. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.

Alat Negara

1. Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
3. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lembaga Pemerintah Lainnya

1. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
2. Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.

Lembaga Penyiaran Publik

1. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia;
2. Direktur Radio Republik Indonesia.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Lembaga Non Struktural

1. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
8. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia;
11. Sekretaris Komisi Kejaksaan;
12. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional;
13. Sekretaris Dewan Pers;
14. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional;
15. Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
16. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;
17. Sekretaris Lembaga Sensor Film;
18. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
19. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden;
20. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Badan Pengusahaan Batam;
21. Deputi Umum Badan Pengusahaan Sabang;
22. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

Provinsi

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

20. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo;
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat;
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua;
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan;
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan;
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Kabupaten/Kota

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Agam;
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Alor;
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan;
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Asmat;
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Badung;
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan;
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung;
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai;
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

25. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli;
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar;
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul;
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
39. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
40. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barru;
41. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang;
42. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari;
43. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
44. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
45. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung;
46. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
47. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belu;
48. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
49. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
50. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
51. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
52. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
53. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
54. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Berau;
55. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
56. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bima;
57. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen;
58. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar;
59. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blora;
60. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
61. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor;
62. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
63. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
64. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
65. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
66. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
67. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana;
68. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
69. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone;
70. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
71. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
72. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali;
73. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



74. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
75. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
76. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan;
77. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo;
78. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buol;
79. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buru;
80. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
81. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton;
82. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
83. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
84. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
85. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
86. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
87. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
88. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
89. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi;
90. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai;
91. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
92. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Demak;
93. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
94. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dogiyai;
95. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu;
96. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala;
97. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
98. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ende;
99. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang;
100. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak;
101. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
102. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut;
103. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
104. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar;
105. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
106. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
107. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa;
108. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
109. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan;
110. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul;
111. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
112. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
113. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
114. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
115. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
116. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
117. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
118. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
119. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
120. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
121. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
122. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



123. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu;
124. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
125. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
126. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
127. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jember;
128. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
129. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
130. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara;
131. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang;
132. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana;
133. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar;
134. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
135. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
136. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
137. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
138. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang;
139. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun;
140. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karo;
141. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan;
142. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur;
143. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
144. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
145. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri;
146. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom;
147. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal;
148. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
149. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
150. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
151. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Bintan;
152. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
153. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
154. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
155. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
156. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
157. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
158. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
159. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;
160. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
161. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
162. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten;
163. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung;
164. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
165. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
166. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
167. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe;
168. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
169. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
170. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
171. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



172. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
173. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
174. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
175. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
176. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
177. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
178. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
179. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang;
180. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
181. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
182. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
183. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
184. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
185. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
186. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat;
187. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau;
188. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
189. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
190. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
191. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
192. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
193. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
194. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Landak;
195. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat;
196. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya;
197. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak;
198. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong;
199. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata;
200. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
201. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga;
202. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
203. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
204. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
205. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
206. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
207. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu;
208. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
209. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
210. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun;
211. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang;
212. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;
213. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
214. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka;
215. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
216. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka;
217. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malang;
218. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau;
219. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
220. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



221. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
222. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
223. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa;
224. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
225. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah;
226. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju;
227. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
228. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
229. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai;
230. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
231. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
232. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari;
233. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan;
234. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi;
235. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maros;
236. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat;
237. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi;
238. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah;
239. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin;
240. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke;
241. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji;
242. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika;
243. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa;
244. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
245. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
246. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
247. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
248. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;
249. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
250. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
251. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
252. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
253. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muna;
254. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
255. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
256. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
257. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
258. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
259. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire;
260. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
261. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo;
262. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna;
263. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nduga;
264. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada;
265. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
266. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi;
267. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;
268. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
269. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



270. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara;
271. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
272. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
273. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
274. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
275. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
276. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
277. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
278. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
279. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
280. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
281. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
282. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
283. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
284. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
285. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
286. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Paniai;
287. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
288. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman;
289. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
290. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
291. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Paser;
292. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
293. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pati;
294. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak;
295. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;
296. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
297. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
298. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang;
299. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
300. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
301. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
302. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
303. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
304. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie;
305. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
306. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
307. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
308. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
309. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
310. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Poso;
311. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
312. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
313. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
314. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
315. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;
316. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak;
317. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
318. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

319. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
320. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo;
321. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
322. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
323. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
324. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
325. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
326. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
327. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
328. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas;
329. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir;
330. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang;
331. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau;
332. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi;
333. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
334. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau;
335. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma;
336. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang;
337. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
338. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
339. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serang;
340. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
341. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan;
342. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Siak;
343. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
344. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
345. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi;
346. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
347. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka;
348. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun;
349. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
350. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai;
351. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;
352. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
353. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
354. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok;
355. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
356. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
357. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong;
358. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
359. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen;
360. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Subang;
361. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
362. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
363. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
364. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
365. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
366. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
367. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



368. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
369. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
370. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
371. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
372. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Supiori;
373. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong;
374. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
375. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar;
376. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw ;
377. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
378. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
379. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
380. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
381. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
382. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
383. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
384. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
385. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
386. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
387. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
388. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
389. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin;
390. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
391. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo;
392. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal;
393. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
394. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
395. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
396. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
397. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
398. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
399. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
400. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tolikara;
401. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
402. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
403. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
404. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban;
405. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
406. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
407. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
408. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo;
409. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
410. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Waropen;
411. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
412. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
413. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
414. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
415. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Yalimo;
416. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ambon;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



417. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;
418. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh;
419. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
420. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung;
421. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjar;
422. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru;
423. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
424. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam;
425. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batu;
426. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Baubau;
427. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
428. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu;
429. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima;
430. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Binjai;
431. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bitung;
432. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Blitar;
433. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor;
434. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang;
435. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;
436. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon;
437. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cimahi;
438. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cirebon;
439. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar;
440. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok;
441. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Dumai;
442. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gorontalo;
443. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli;
444. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jambi;
445. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jayapura;
446. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kediri;
447. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kendari;
448. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu;
449. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kupang;
450. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Langsa;
451. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe;
452. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
453. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Madiun;
454. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang;
455. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar;
456. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang;
457. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Manado;
458. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Mataram;
459. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan;
460. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Metro;
461. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Mojokerto;
462. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang;
463. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang;
464. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan;
465. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



466. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya;
467. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang;
468. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo;
469. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palu;
470. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
471. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Parepare;
472. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman;
473. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pasuruan;
474. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh;
475. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekalongan;
476. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
477. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
478. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak;
479. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Prabumulih;
480. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Probolinggo;
481. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sabang;
482. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Salatiga;
483. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda;
484. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto;
485. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang;
486. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Serang;
487. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sibolga;
488. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Singkawang;
489. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solok;
490. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sorong;
491. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Subulussalam;
492. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sukabumi;
493. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh;
494. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya;
495. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta;
496. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang;
497. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
498. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
499. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang;
500. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tarakan;
501. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
502. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
503. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tegal;
504. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ternate;
505. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
506. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tomohon;
507. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tual;
508. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



DAFTAR PENERIMA SURAT

Perguruan Tinggi (Tembusan)

1. Universitas Telkom, Jawa Barat;
2. Universitas Indonesia, Jawa Barat;
3. Universitas Gunadarma, Jawa Barat;
4. Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta;
5. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Jawa Timur;
6. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jawa Timur;
7. Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat;
8. Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat;
9. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta;
10. Universitas Airlangga, Jawa Timur;
11. Universitas Bina Nusantara, DKI Jakarta;
12. Universitas Brawijaya, Jawa Timur;
13. Universitas Diponegoro, Jawa Tengah;
14. Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta;
15. Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan;
16. Universitas Islam Indonesia, D.I. Yogyakarta;
17. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten;
18. Universitas Kristen Petra, Jawa Timur;
19. Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah;
20. Universitas Padjadjaran, Jawa Barat;
21. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara;
22. Universitas Surabaya, Jawa Timur;
23. Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta;
24. Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur;
25. Universitas Udayana, Bali.
26. Politeknik Caltex Riau, Riau;
27. Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur;
28. Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah;
29. Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat;
30. Institut Teknologi Kalimantan, Kalimantan Timur;
31. Yayasan Upaya Indonesia Damai;
32. Universitas AMIKOM Yogyakarta;
33. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS);
34. Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT-PLN);
35. Universitas Pamulang;
36. Universitas Cenderawasih, Papua; dan
37. Universitas Papua, Papua Barat.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

AGENDA TENTATIF PELAKSANAAN SOSIALISASI EVALUASI SPBE TAHUN 2024

Selasa, 16 Juli 2024

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
08.00 – 08.30	Registrasi Kegiatan	Tim Asdep SPBE
08.30 – 08.35	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Tim Asdep SPBE
08.35 – 08.40	Pembacaan Doa	Tim Asdep SPBE
08.40 – 09.00	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Cahyono Tri Birowo, ST., MTI. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE
09.00 – 09.15	Arahan dan Pembukaan	Nanik Murwati, S.E., M.A. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
09.15 – 10.15	Diseminasi Progres, Tindak Lanjut, dan Perubahan Pedoman Teknis Evaluasi SPBE	Tim Asdep SPBE
10.15 – 12.15	Pemaparan dan Diskusi: Domain Kebijakan Internal	Ir. Khakim Ghozali, M.MT. Institut Teknologi Kalimantan
12.15 – 13.15	<i>Ishoma</i>	
13.15 – 15.15	Pemaparan dan Diskusi: Domain Tata Kelola	Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Rabu, 17 Juli 2024

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
08.30 – 09.00	Registrasi Kegiatan	Tim Asdep SPBE
09.00 – 11.00	Pemaparan dan Diskusi: Domain Manajemen – Aspek Penerapan Manajemen	Soni Fajar Surya Gumilang, S.T., M.T. Telkom University
11.00 – 12.00	Pemaparan dan Diskusi: Domain Manajemen – Aspek Pelaksanaan Audit TIK	
12.00 – 13.00	<i>Ishoma</i>	
13.00 – 15.00	Pemaparan dan Diskusi: Domain Layanan	Dr.rer.nat. I Made Wiryana Universitas Gunadarma
15.00 – 16.00	Pemaparan dan Diskusi: Penggunaan Aplikasi	Tim Asdep SPBE

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kamis, 18 Juli 2024

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
08.30 – 09.00	Registrasi Kegiatan	Tim Asdep SPBE
09.00 – 11.00	Pemaparan dan Diskusi: Tata Kelola Pembangunan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE	Kementerian Komunikasi dan Informatika
11.00 – 12.00	Pemaparan dan Diskusi: Manajemen Pengetahuan	Badan Riset dan Inovasi Nasional
12.00 – 13.00	<i>Ishoma</i>	
13.00 – 15.00	Pemaparan dan Diskusi: Manajemen Keamanan Informasi dan Audit Keamanan	Badan Siber dan Sandi Negara
15.00 – 15.30	Penutupan	Cahyono Tri Birowo, ST., MTI. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIALISASI EVALUASI SPBE TAHUN 2024

1. Kegiatan Sosialisasi Evaluasi SPBE akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom video conference. *ID Meeting* dan *Password* akan dikirimkan melalui email masing-masing narahubung perwakilan IPPD yang mendaftar pada <https://s.id/SosialisasiEvaluasi2024>. Dikarenakan keterbatasan kapasitas peserta dalam aplikasi Zoom, setiap IPPD paling banyak dapat bergabung **melalui 2 akun Zoom**.
2. Waktu yang dijadwalkan menggunakan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), diharapkan perwakilan IPPD yang berada pada zona waktu yang berbeda agar menyesuaikan.
3. Perwakilan IPPD diwajibkan memasuki ruang *virtual meeting* (Zoom) 15 (lima belas) menit sebelum **dimulai kegiatan** untuk memastikan pelaksanaan dapat berjalan tepat waktu.
4. Agar memudahkan identifikasi, Perwakilan IPPD wajib memberikan nama pada zoomnya dengan ketentuan sebagai berikut: **Singkatan Nama Pemda–Nama Perwakilan** (*contoh: KAB.TAKALAR-Iksan Ramadhan*)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ



Balai
Sertifikasi
Elektronik

5. Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE di nomor 021 7398381 – 89 ext 2111, dan/atau kontak berikut:
- Arman Kurniawan (0852-2119-8920) untuk Narahubung Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota
 - Eka Bella (0895-3602-81347) untuk Narahubung Pemerintah Kabupaten di area Sumatera, Kalimantan, Papua, Papua Barat
 - Muthia Nur (0857-7310-1473) untuk Narahubung Pemerintah Kabupaten di area Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara
 - Joshua Ariel (0856-5101-5615) untuk Narahubung terkait Aplikasi Tauval SPBE.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240709FHSQ

